



Muhammadiyah dan Dinamika Transformasi Sosial-Politik di Minangkabau: Perspektif Sosiologi Gerakan Sosial Kontemporer

Frans Tory Damara Pradipta^{1*}, Novendra Hidayat², Feni Yulianti³, Shinta Lestari Oktarini⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

*Email: franstory24@gmail.com

Submitted: September 4 th , 2025	Accepted: March 11 th , 2026	Published: October 21 st , 2026
---	---	--

Abstract: This study examines the role of Muhammadiyah as an agent of socio-political transformation in Minangkabau, a region characterized by the interaction between modernist Islamic movements and the cultural philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Using a qualitative approach through library research, this study analyzes academic literature, journal articles, and official organizational documents related to Muhammadiyah's activities in West Sumatra. The analysis is conducted using the perspectives of contemporary social movement theory, focusing on resource mobilization, political opportunity, and framing processes. The findings indicate that Muhammadiyah functions not only as a religious organization but also as a dynamic social movement that mobilizes institutional resources in education, health, and economic sectors to strengthen its social influence. Furthermore, Muhammadiyah strategically utilizes political opportunities without engaging in partisan politics and frames progressive Islamic values in harmony with Minangkabau cultural principles. This study concludes that Muhammadiyah in Minangkabau represents a form of Islamic social movement that successfully integrates faith, culture, and modernity in a balanced and transformative manner.

Keywords: Muhammadiyah; Minangkabau; Socio-political Transformation; Social Movements; ABS-SBK

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam modern yang memiliki peran penting dalam dinamika keagamaan dan sosial di Indonesia. Sejak berdiri pada awal abad ke-20, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan Islam yang menekankan pemurnian ajaran, rasionalitas keagamaan, serta modernisasi dalam bidang pendidikan dan dakwah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang terlibat aktif dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan filantropi. Peran multidimensional ini menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil yang berkontribusi dalam proses transformasi sosial di Indonesia.

Perkembangan Muhammadiyah tidak hanya berlangsung di pusat-pusat perkotaan di Pulau Jawa, tetapi juga meluas ke berbagai daerah dengan karakter sosial budaya yang beragam. Ekspansi geografis ini menunjukkan kemampuan adaptasi Muhammadiyah dalam menghadapi keragaman konteks lokal, baik dari segi budaya, struktur sosial, maupun sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas adalah Minangkabau di Sumatera Barat, yang dikenal dengan kekuatan tradisi adat dan sistem sosial berbasis kekerabatan matrilineal.

Kehadiran Muhammadiyah di Minangkabau berlangsung dalam konteks masyarakat yang berpegang pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, integrasi tersebut tidak serta-merta menciptakan keselarasan tanpa dinamika. Relasi antara gerakan Islam modernis seperti Muhammadiyah dengan budaya lokal Minangkabau merupakan proses sosial yang kompleks, yang melibatkan interaksi, negosiasi, dan bahkan potensi ketegangan nilai. Di satu sisi, Muhammadiyah membawa gagasan pembaruan yang berorientasi pada pemurnian praktik keagamaan serta rasionalisasi pemahaman Islam. Di sisi lain, masyarakat Minangkabau memiliki struktur adat dan tradisi keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial.

Situasi tersebut menempatkan Muhammadiyah dalam posisi yang menuntut adanya strategi adaptasi dan negosiasi sosial agar gerakannya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Proses adaptasi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, di mana Muhammadiyah harus mampu membaca, memahami, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam praktik gerakannya. Dengan demikian, keberhasilan Muhammadiyah dalam berkembang di Minangkabau tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ideologisnya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun relasi sosial yang harmonis dengan struktur adat dan budaya lokal.

Dalam konteks sosial masyarakat Minangkabau, struktur kolektivitas dan peran aktor lokal menjadi elemen penting dalam membentuk dinamika sosial yang berlangsung. Hal ini tercermin dalam konsep tanah ulayat yang tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai aset sosial yang mengikat hubungan antaranggota masyarakat, di mana tanah ulayat merupakan tanah komunal sebagai social asset tanah menjadi sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat. Selain itu, pola gerakan sosial di tingkat lokal juga ditopang oleh aktor-aktor tradisional seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai yang bekerja secara kolektif dalam merespons berbagai persoalan sosial melalui mediasi dan edukasi masyarakat (Rido et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, praktik dakwah juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berbasis nilai moral, sebagaimana terlihat dalam gerakan amar makruf dan nahi mungkar yang dijalankan oleh pemimpin tradisional (Rido et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang sosial Minangkabau bukanlah ruang yang kosong, melainkan telah dipenuhi oleh aktor, nilai, dan struktur yang memiliki legitimasi kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur sosial tersebut. Muhammadiyah tidak hanya berhadapan dengan masyarakat sebagai individu, tetapi juga dengan sistem nilai kolektif yang telah mengatur kehidupan sosial secara turun-temurun. Dalam situasi ini, interaksi antara Muhammadiyah dan

masyarakat Minangkabau menjadi arena penting untuk memahami bagaimana gerakan Islam modern beroperasi dalam konteks budaya lokal yang kuat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perkembangan Muhammadiyah di Minangkabau dari berbagai sudut pandang. Firdaus et al. (2024) menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau berkembang sebagai gerakan yang ditopang oleh peran ulama dan pedagang sehingga memiliki basis sosial yang relatif kuat dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa jaringan sosial dan ekonomi berkontribusi secara signifikan terhadap keberlangsungan gerakan Muhammadiyah di Sumatera Barat. Sementara itu, Hanifuddin (2016) menyoroti hubungan Muhammadiyah dengan adat Minangkabau, khususnya dalam isu tanah ulayat, dan menemukan adanya dinamika antara prinsip-prinsip Islam modernis dengan struktur adat lokal.

Kajian lain menekankan peran tokoh dan konteks historis dalam penyebaran Muhammadiyah di Sumatera Barat. Kontribusi Haji Abdul Karim Amrullah dalam penguatan Muhammadiyah di Maninjau, yang menunjukkan bahwa figur ulama lokal berperan penting dalam proses institusionalisasi gerakan ini. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai sejarah, tokoh, dan relasi Muhammadiyah dengan budaya lokal, sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif-historis dan belum secara mendalam mengkaji Muhammadiyah sebagai aktor dalam kerangka teori gerakan sosial kontemporer.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diisi. Hingga saat ini, kajian yang secara sistematis menempatkan Muhammadiyah di Minangkabau sebagai gerakan sosial dengan menggunakan perspektif teoretis seperti *resource mobilization*, *political opportunity structure*, dan *framing process* masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memahami bagaimana Muhammadiyah mengelola sumber daya, memanfaatkan peluang politik, serta membingkai nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal. Dengan menggunakan kerangka teori gerakan sosial, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai dinamika Muhammadiyah di Minangkabau.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dalam upayanya mengintegrasikan analisis gerakan sosial dengan konteks budaya lokal Minangkabau yang khas. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap interaksi antara Islam modernis dan adat, serta bagaimana keduanya dapat saling beradaptasi dalam proses transformasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian tentang Muhammadiyah, tetapi juga pada pengembangan studi tentang hubungan antara agama, budaya, dan masyarakat sipil di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Muhammadiyah di Minangkabau beroperasi sebagai gerakan sosial serta strategi yang digunakan dalam berinteraksi dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Secara khusus, penelitian ini menganalisis peran Muhammadiyah dalam memobilisasi sumber daya, memanfaatkan peluang politik, serta membingkai nilai-nilai Islam berkemajuan dalam konteks budaya lokal.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai gerakan keagamaan modernis, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mampu melakukan negosiasi kultural melalui

jaringan pendidikan, dakwah, dan aktivitas sosial. Melalui strategi tersebut, Muhammadiyah berhasil membangun legitimasi sosial dan memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat Minangkabau yang memiliki tradisi adat yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan gerakan Islam modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ideologi, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi kultural dan strategi sosial yang kontekstual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara konseptual dan interpretatif peran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dalam transformasi sosial-politik masyarakat Minangkabau. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan sepenuhnya menggunakan sumber tertulis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks dan dokumen ilmiah yang membahas Muhammadiyah, baik berupa artikel jurnal, buku, hasil penelitian, maupun dokumen resmi organisasi. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau informan karena berbasis data sekunder.

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan transformasi sosial-politik di Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik, repositori perguruan tinggi, serta publikasi resmi Muhammadiyah. Literatur yang terkumpul kemudian diseleksi sesuai fokus penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) kualitatif untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna dalam literatur yang dianalisis sehingga dapat menggambarkan peran dan strategi Muhammadiyah dalam konteks sosial-politik secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Gerakan Sosial Keagamaan

Dalam kajian sosiologi, gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif yang terorganisasi untuk mendorong perubahan sosial melalui mobilisasi sumber daya dan pembentukan identitas kolektif (McCarthy & Zald, 1977). Pendekatan ini melihat gerakan sosial sebagai aktivitas yang rasional dan terstruktur, di mana keberhasilan gerakan ditentukan oleh kemampuan aktor dalam mengelola organisasi, jaringan, serta sumber daya yang dimiliki. Perspektif ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial bukan sekadar reaksi spontan, tetapi merupakan hasil dari strategi yang dirancang secara sistematis.

Dalam konteks yang lebih luas, gerakan sosial juga berkaitan erat dengan peluang politik yang tersedia dalam suatu sistem sosial (Tarrow, 2011). Struktur politik yang terbuka memberikan ruang bagi gerakan untuk berkembang dan memengaruhi kebijakan publik, sementara struktur yang tertutup membatasi ruang gerak aktor sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan sosial selalu

berada dalam relasi dengan kekuasaan sehingga strategi gerakan tidak dapat dilepaskan dari konteks politik yang melingkupinya.

Gerakan sosial keagamaan menunjukkan karakter yang lebih kompleks karena menggabungkan dimensi ideologis dan praksis sosial. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen mobilisasi yang efektif dalam membangun solidaritas kolektif. Dalam praktiknya, gerakan keagamaan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat karena memiliki legitimasi moral yang kuat sehingga lebih mudah diterima dibandingkan dengan gerakan yang bersifat sekuler.

Dalam konteks empiris, gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah memperlihatkan bahwa aktivitas keagamaan terintegrasi dengan agenda sosial yang lebih luas. Peran Muhammadiyah tidak terbatas pada dakwah keagamaan, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Abdullah et al., 2023). Pola ini menunjukkan bahwa gerakan keagamaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mampu mengelola berbagai bentuk pelayanan publik secara terorganisasi. Aktivitas tersebut juga memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial di Indonesia.

Dari sisi identitas kolektif, gerakan sosial keagamaan membangun solidaritas melalui proses framing yang mengaitkan nilai-nilai agama dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat (Snow & Benford, 2000). Proses ini menghasilkan pemaknaan bersama yang mendorong individu untuk terlibat dalam gerakan. Dalam konteks Muhammadiyah, framing keagamaan yang menekankan rasionalitas dan pembaruan Islam berkontribusi dalam membentuk identitas kolektif yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Gerakan sosial keagamaan juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat masyarakat sipil. Organisasi keagamaan berperan dalam menciptakan ruang publik yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang partisipatif (Habermas, 1991). Jaringan sosial yang terbentuk melalui aktivitas keagamaan turut meningkatkan kepercayaan sosial dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik (Putnam, 1993). Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan keagamaan tidak hanya berperan dalam ranah spiritual, tetapi juga dalam memperkuat fondasi sosial demokrasi.

Dalam konteks lokal, interaksi antara gerakan keagamaan dan budaya menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan gerakan. Di Minangkabau, nilai-nilai adat yang kuat membentuk struktur sosial yang khas sehingga gerakan keagamaan perlu menyesuaikan strategi agar dapat diterima oleh masyarakat (Kurniawan, 2021). Adaptasi ini terlihat dalam pola interaksi antara ajaran keagamaan dan praktik budaya lokal yang berlangsung secara dinamis. Kemampuan membaca konteks lokal menjadi kunci dalam menjaga relevansi gerakan di tengah masyarakat.

Gerakan sosial keagamaan pada akhirnya dapat dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga pada praktik sosial yang konkret. Ia bekerja melalui jaringan, institusi, dan strategi yang terorganisasi untuk menghasilkan perubahan sosial. Dalam penelitian ini, konsep gerakan sosial keagamaan digunakan untuk menganalisis bagaimana Muhammadiyah beroperasi sebagai aktor sosial yang aktif dalam merespons dinamika budaya dan struktur sosial di Minangkabau.

2. Teori Gerakan Sosial

McAdam, McCarthy, dan Zald menjelaskan bahwa dinamika gerakan sosial dapat dipahami melalui tiga konsep utama, yaitu *resource mobilization*, *political opportunity structure*, dan *framing process* (McAdam, 1982). Pendekatan ini melihat gerakan sosial sebagai proses yang terorganisasi, di mana aktor tidak hanya digerakkan oleh nilai, tetapi juga oleh kemampuan strategis dalam mengelola sumber daya dan membaca konteks sosial.

Konsep *resource mobilization* menempatkan sumber daya sebagai faktor kunci dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Gerakan tidak akan berkembang tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya manusia, jaringan organisasi, maupun kapasitas institusional (McCarthy & Zald, 1977). Dalam praktiknya, kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya menentukan sejauh mana gerakan mampu bertahan dan memperluas pengaruhnya. Gerakan yang memiliki jaringan luas dan struktur organisasi yang kuat cenderung lebih efektif dalam menjalankan agenda perubahan dibandingkan gerakan yang bersifat sporadis.

Selain itu, *political opportunity structure* menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, terutama sistem politik dan relasi kekuasaan. Struktur politik yang terbuka memberikan peluang bagi gerakan untuk berkembang, sementara kondisi politik yang tertutup membatasi ruang gerak aktor sosial (Tarrow, 2011). Dalam konteks ini, gerakan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan kekuatan politik yang ada. Kemampuan membaca peluang politik menjadi faktor penting dalam menentukan strategi gerakan, termasuk dalam membangun aliansi, memanfaatkan celah kekuasaan, serta merespons dinamika elite politik.

Konsep *framing process* menyoroti pentingnya konstruksi makna dalam gerakan sosial. Aktor gerakan tidak hanya mengorganisasi sumber daya, tetapi juga membangun narasi yang mampu menarik dukungan publik. Proses framing melibatkan seleksi dan penafsiran realitas sosial agar sesuai dengan tujuan gerakan (Snow & Benford, 2000). Melalui framing yang efektif, gerakan dapat membangun legitimasi, memperkuat identitas kolektif, serta memengaruhi cara masyarakat memahami isu yang diangkat. Dalam konteks ini, framing menjadi alat strategis untuk menghubungkan nilai-nilai ideologis dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Mobilisasi sumber daya tanpa dukungan peluang politik akan membatasi efektivitas gerakan. Peluang politik yang terbuka juga tidak akan menghasilkan perubahan signifikan tanpa adanya kapasitas organisasi yang kuat. Framing yang tidak mampu menjangkau masyarakat akan membuat gerakan kehilangan dukungan publik. Interaksi antara ketiga elemen ini membentuk dinamika gerakan sosial yang bersifat kontekstual dan bergantung pada situasi yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, konsep *resource mobilization*, *political opportunity structure*, dan *framing process* digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca dinamika Muhammadiyah di Minangkabau. Ketiga konsep tersebut membantu menjelaskan bagaimana Muhammadiyah mengelola sumber daya organisasi, merespons peluang politik, serta membangun narasi keagamaan yang relevan dengan konteks sosial lokal.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola gerakan Muhammadiyah sehingga hasil penelitian tidak berhenti pada deskripsi, tetapi mampu menjelaskan strategi dan proses yang membentuk keberhasilan gerakan tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mobilisasi Sumber Daya oleh Muhammadiyah

Berdasarkan analisis terhadap literatur dan dokumen resmi organisasi, Muhammadiyah di Sumatera Barat menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam memobilisasi sumber daya kelembagaan dan sosial. Mobilisasi tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, filantropi, dan kebencanaan, yang dijalankan melalui jaringan amal usaha dan lembaga otonom Muhammadiyah.

Mobilisasi sumber daya yang dilakukan Muhammadiyah di Sumatera Barat menunjukkan bahwa organisasi ini tidak sekadar berfungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang memiliki kapasitas struktural dan sosial yang kuat. Kemampuan mengelola berbagai sektor pelayanan publik memperlihatkan bahwa Muhammadiyah menjalankan peran ganda, yaitu sebagai gerakan dakwah dan sebagai penyedia layanan sosial bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori *resource mobilization*, keberhasilan suatu gerakan sosial sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengakses, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut, karena menunjukkan bahwa Muhammadiyah mampu mengoptimalkan sumber daya kelembagaan, sumber daya manusia, serta modal sosial untuk menopang keberlanjutan gerakannya. Jaringan amal usaha tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.

Lebih jauh, mobilisasi sumber daya Muhammadiyah memperlihatkan pola yang terorganisasi dan berkelanjutan. Keberadaan lembaga pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah memungkinkan Muhammadiyah membangun hubungan yang erat dengan masyarakat lokal. Hubungan ini berkontribusi pada terbentuknya modal sosial berupa kepercayaan, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap aktivitas organisasi. Modal sosial tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan daya tahan gerakan Muhammadiyah di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Selain dimensi organisatoris, mobilisasi sumber daya Muhammadiyah juga memiliki dimensi normatif yang berakar pada nilai-nilai keislaman. Pengelolaan sumber daya ekonomi dan filantropi tidak dilepaskan dari prinsip keadilan dan keseimbangan sebagai landasan etis. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. (QS. Ar-Rahman: 7-8):

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas terhadap neraca itu.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks Muhammadiyah, nilai ini diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang tidak hanya berorientasi pada penguatan

kelembagaan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencapaian kemaslahatan sosial. Mobilisasi sumber daya Muhammadiyah dapat dipahami sebagai praktik sosial yang memadukan rasionalitas organisasi dengan nilai-nilai Islam berkemajuan.

Secara keseluruhan, mobilisasi sumber daya oleh Muhammadiyah di Sumatera Barat mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola kekuatan struktural dan moral secara simultan. Mobilisasi ini tidak hanya menghasilkan efektivitas organisasi, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Peluang Politik dan Peran Muhammadiyah sebagai *Civil Society*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau memiliki peran yang signifikan dalam ruang sosial-politik lokal, terutama melalui pengelolaan amal usaha dan aktivitas sosial-keagamaan yang bersifat non-partisan. Muhammadiyah aktif dalam ruang publik tanpa terlibat langsung dalam politik kekuasaan, dengan menempatkan diri sebagai kekuatan moral yang berkontribusi pada penguatan masyarakat sipil.

Secara empiris, peran Muhammadiyah sebagai aktor *civil society* tercermin dari bidang-bidang amal usaha yang dikelolanya. Gambaran mengenai dimensi peran, bentuk aktivitas, serta dampak utama amal usaha Muhammadiyah di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bidang Amal Usaha Muhammadiyah

Dimensi	Bentuk Peran	Dampak Utama	Sumber Data
Politik Nilai	Advokasi moral, pendidikan politik, kaderisasi non-partisan	Meningkatnya etika politik dan partisipasi warga	PWM Sumbar, 2024; Suryana, 2020
Civil Society	Amal usaha sosial, pendidikan, kesehatan	Pelayanan publik non-negara meningkat	PWM Sumbar, 2024; LAZISMU, 2023
Moderasi & Pluralisme	Dakwah inklusif, dialog lintas budaya	Terjaganya kerukunan sosial di nagari	Setiawati et al. (2025)

Sumber: Hasil olah data oleh penulis

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa amal usaha Muhammadiyah tidak hanya berorientasi pada pelayanan sosial, tetapi juga memiliki dampak politik dalam arti luas, yaitu penguatan etika publik, partisipasi warga, dan kerukunan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa Muhammadiyah menjalankan peran *civil society* melalui jalur non-elektoral yang berkelanjutan dan terlembaga.

Dinamika peran Muhammadiyah di Minangkabau menunjukkan pola keterlibatan sosial-politik yang khas, yakni aktif dalam ruang publik tanpa terlibat langsung dalam politik kekuasaan. Pola ini sejalan dengan konsep politik nilai (*moral politics*) yang telah menjadi karakter Muhammadiyah sejak masa awal berdirinya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memosisikan diri sebagai *pressure group* moral yang berfungsi mengawasi kebijakan publik dan memperjuangkan nilai-nilai Islam berkemajuan di tengah masyarakat (Nashir, 2015).

Dalam kerangka teori *political opportunity structure*, keberhasilan gerakan sosial sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca dan memanfaatkan peluang politik yang tersedia (Tarrow, 2011). Muhammadiyah di Sumatera Barat menunjukkan kemampuan tersebut dengan memanfaatkan ruang publik untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan advokasi kebijakan tanpa harus terlibat dalam kontestasi politik partisan. Strategi ini memungkinkan Muhammadiyah menjaga independensi organisasi sekaligus tetap relevan dalam dinamika politik lokal.

Prinsip *amar maruf nahi munkar* menjadi fondasi normatif dalam setiap aktivitas sosial-politik Muhammadiyah. Prinsip ini diterapkan melalui pendekatan rasional, moderat, dan berbasis nilai kemanusiaan universal. Berbeda dengan gerakan keagamaan yang bersifat ideologis dan eksklusif, Muhammadiyah lebih menekankan rasionalitas moral sebagai instrumen transformasi sosial. Moderasi ini tercermin dalam sikap organisasi yang tidak melarang kadernya terlibat dalam politik, namun tetap menekankan etika moral dan tanggung jawab publik.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Habermas (1991) mengenai peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga ruang publik (*public sphere*) agar tetap rasional dan terbuka terhadap kritik. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai representasi civil Islam, yaitu Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, rasionalitas, dan kompatibel dengan demokrasi. Pola keterlibatan non-partisan ini juga sesuai dengan konsep non-partisan engagement, di mana gerakan Islam memanfaatkan peluang politik untuk memperjuangkan nilai sosial, bukan kekuasaan (Suryana, 2020).

Konteks sosial Minangkabau turut memperkuat peran Muhammadiyah sebagai *civil society*. Struktur sosial berbasis nagari dan budaya musyawarah memberikan ruang bagi organisasi ini untuk beradaptasi dan memperoleh legitimasi sosial. Prinsip musyawarah yang hidup dalam masyarakat Minangkabau sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38):

بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."

Ayat ini menegaskan bahwa syura merupakan fondasi etika politik dalam Islam. Muhammadiyah menginternalisasi prinsip tersebut dalam sistem organisasinya yang demokratis dan kolektif sehingga selaras dengan falsafah lokal *bulek kato dek mufakat*. Kesesuaian antara nilai Islam dan budaya lokal inilah yang membuat Muhammadiyah dapat diterima luas di tengah masyarakat Minangkabau.

Selain itu, peran Muhammadiyah dalam memperkuat *civil society* juga tercermin dari kontribusinya dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Melalui LAZISMU, Muhammadiyah menyalurkan dana sosial sebesar Rp 38,7 miliar pada tahun 2023 untuk program pengentasan kemiskinan dan beasiswa pendidikan (LAZISMU, 2023). Aktivitas ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai keadilan di tingkat lokal.

Dalam masyarakat Minangkabau yang plural, Muhammadiyah juga berperan menjaga harmoni sosial melalui dakwah inklusif dan kerja sosial lintas budaya. Pendekatan ini berakar pada ajaran Al-Quran tentang pluralitas manusia (QS. Al-Hujurat: 13):

لِنَعَارِفُهَا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقَانَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَهْيَا يَا

Ayat ini menjadi dasar teologis bagi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat inklusif dan menghargai keberagaman. Strategi cultural engagement yang diterapkan Muhammadiyah bukan merupakan kompromi ideologis, melainkan integrasi nilai Islam berkemajuan dengan realitas sosial lokal (Setiawati et al., 2025).

Muhammadiyah di Minangkabau memainkan peran ganda sebagai kekuatan keagamaan dan sebagai agent of social reform. Ia bukan oposisi negara, melainkan mitra kritis dalam membangun masyarakat madani. Pola ini menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan contoh nyata civil Islam yang mampu mengintegrasikan nilai keislaman, demokrasi, dan kearifan lokal secara harmonis.

3. Framing Nilai Islam Berkemajuan dalam Budaya Minangkabau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau membingkai nilai Islam Berkemajuan melalui pendekatan budaya yang kontekstual. Nilai-nilai Islam tidak disampaikan dengan cara konfrontatif terhadap adat, melainkan diintegrasikan ke dalam struktur sosial Minangkabau yang berbasis nagari, musyawarah, dan kolektivitas.

Framing tersebut tampak dalam praktik dakwah, pendidikan, dan aktivitas sosial Muhammadiyah yang menggunakan bahasa, simbol, serta mekanisme sosial yang akrab dengan masyarakat lokal. Nilai rasionalitas, moderasi, keadilan sosial, dan inklusivitas dihadirkan sebagai bagian dari kehidupan sosial sehari-hari, bukan sebagai konsep normatif yang terpisah dari realitas budaya.

Framing nilai Islam Berkemajuan dalam budaya Minangkabau menunjukkan strategi kultural Muhammadiyah dalam menghubungkan ajaran Islam dengan konteks sosial lokal. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Islam modernis hadir tanpa menimbulkan resistensi budaya. Muhammadiyah tidak meniadakan adat, tetapi menempatkan budaya sebagai medium penyampaian nilai keislaman.

Falsafah Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menyediakan ruang normatif bagi integrasi Islam dan budaya. Dalam kerangka ini, nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab kolektif menjadi titik temu antara Islam Berkemajuan dan adat Minangkabau. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Quran (QS. Asy-Syura: 38):

بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."

Prinsip musyawarah yang dijalankan Muhammadiyah dalam sistem organisasinya memiliki kesesuaian dengan budaya *bulek kato dek mufakat*. Kesesuaian ini memperkuat penerimaan sosial terhadap Muhammadiyah karena nilai Islam yang dibawa tidak bertentangan dengan praktik sosial masyarakat.

Selain itu, framing Islam Berkemajuan juga menekankan moderasi dan inklusivitas. Dalam masyarakat Minangkabau yang plural, Muhammadiyah mengembangkan dakwah yang rasional dan dialogis. Pendekatan ini berakar pada

pandangan Islam tentang kesetaraan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran (QS. Al-Hujurat: 13):

لَتَعَارَفُوا وَفَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاهُمْ وَأُنْتَى ذَكَرٍ مِنْ خَلْقَانَا إِنَّا النَّاسُ أَئْيَاهَا يَا

Nilai ini mendorong Muhammadiyah untuk membangun relasi sosial yang inklusif melalui kerja sama lintas budaya dan keterlibatan dalam ruang-ruang sosial nagari. Islam Berkemajuan dipraktikkan sebagai etika sosial yang mendorong toleransi, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Secara keseluruhan, framing nilai Islam Berkemajuan oleh Muhammadiyah di Minangkabau menunjukkan proses integrasi antara Islam modernis dan budaya lokal. Islam tidak tampil sebagai identitas simbolik semata, tetapi sebagai nilai operasional yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Keberhasilan framing ini terletak pada kemampuan Muhammadiyah membaca budaya lokal dan menjadikannya sarana transformasi sosial.

4. Sintesis dan Implikasi Akademik

Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang berperan membangun masyarakat madani (*civil society*) berbasis nilai Islam berkemajuan. Keberhasilannya menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan modernitas menunjukkan tingkat adaptasi sosial yang tinggi dan menjadi contoh bagaimana Islam dapat menjadi motor perubahan sosial yang konstruktif.

Dari hasil pembahasan sebelumnya, terdapat tiga temuan utama. Pertama, kemampuan Muhammadiyah dalam memobilisasi sumber daya menjadi faktor kunci dalam memperkuat kapasitas organisasi. Melalui pendidikan, sosial, dan ekonomi, Muhammadiyah berhasil membangun jaringan amal usaha yang berkelanjutan. Mobilisasi ini tidak hanya menghasilkan kemandirian lembaga, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah sosial hingga ke tingkat nagari.

Kedua, dalam aspek peluang politik, Muhammadiyah di Minangkabau menjalankan peran sebagai penjaga moral publik. Tanpa terlibat dalam politik kekuasaan, organisasi ini tetap aktif dalam advokasi kebijakan sosial dan pendidikan. Peran non-partisan tersebut memperlihatkan bentuk politik nilai, di mana Muhammadiyah mengedepankan etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan publik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *amar maruf nahi munkar* yang menjadi landasan teologis gerakan sosial Islam.

Ketiga, dalam konteks budaya dan dakwah kultural, Muhammadiyah berhasil melakukan framing nilai Islam berkemajuan ke dalam tradisi Minangkabau melalui falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Pendekatan dakwah yang bijak (*bil hikmah*) membuat organisasi ini diterima luas tanpa menimbulkan resistensi budaya. Integrasi antara nilai agama dan adat memperlihatkan bahwa Islam tidak harus bertentangan dengan tradisi, melainkan dapat menjadi sumber moral dan rasionalitas sosial.

Dari ketiga aspek tersebut, terlihat bahwa kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan modernitas. Hal ini sesuai dengan pesan Al-Quran (QS. Al-Qashash: 77):

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. □

Ayat ini mencerminkan semangat Islam berkemajuan yang dipegang Muhammadiyah, yaitu keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara spiritualitas dan realitas sosial. Dengan prinsip itu, Muhammadiyah di Minangkabau tampil sebagai gerakan sosial yang tidak hanya menegaskan nilai agama, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan manusia.

Dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa gerakan Islam modern seperti Muhammadiyah mampu mengimplementasikan *teori resource mobilization* dan *framing process* dalam konteks budaya lokal. Muhammadiyah menjadi contoh bahwa organisasi keagamaan dapat memainkan peran penting dalam demokrasi tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Temuan ini relevan bagi pengembangan studi politik Islam dan masyarakat sipil di Indonesia, terutama dalam menegaskan bahwa agama dapat menjadi kekuatan pendorong demokratisasi, bukan penghambatnya.

Secara sosial, keberadaan Muhammadiyah di Minangkabau memperkuat solidaritas masyarakat dan memperkecil kesenjangan antara negara dan warga. Melalui pendidikan, filantropi, dan dakwah kultural, Muhammadiyah membuktikan bahwa agama mampu berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks ini, Islam berkemajuan menjadi bukan hanya gagasan normatif, tetapi juga praktik sosial yang hidup dan berdampak nyata bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Minangkabau berhasil menampilkan wajah Islam berkemajuan yang harmonis dengan budaya lokal. Melalui mobilisasi sumber daya di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, organisasi ini mampu memperkuat posisi masyarakat sipil (*civil society*) dan menjadi kekuatan moral dalam kehidupan sosial-politik. Pendekatan dakwah kultural yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menjadikan nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga hidup dalam praktik sosial masyarakat Minangkabau.

Selain itu, Muhammadiyah di Minangkabau menunjukkan bahwa Islam modern dapat berdialog dengan demokrasi tanpa kehilangan identitasnya. Keseimbangan antara nilai spiritual dan rasionalitas sosial menjadikan gerakan ini relevan di tengah perubahan zaman. Prinsip Islam berkemajuan, berilmu, berkeadilan, dan berkemaslahatan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berperadaban.

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar Muhammadiyah terus memperkuat pendekatan dakwah berbasis budaya dan digital untuk menjangkau generasi muda serta memperluas dampak sosialnya. Di sisi akademik, studi lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara dinamika gerakan Islam modern dan sistem sosial lokal di berbagai daerah, agar kontribusi Islam terhadap pembangunan bangsa dapat dipahami secara lebih komprehensif.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas dukungan akademik yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang telah membantu penyusunan penelitian ini hingga selesai. Selain itu, penulis berterima kasih kepada pihak yang telah mendukung pendanaan publikasi serta kepada para peneliti terdahulu yang karyanya menjadi referensi penting dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. L., Inam, A., Hasbi, M., & Tanjung, A. (2023). Pergerakan Muhammadiyah sebagai gerakan agama, ideologis, sosial, dan ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1143-1149. <https://doi.org/10.29210/0202312121>.
- Al-Quran al-Karim. (2005). *Mushaf al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Sumatera Barat dalam Angka 2024*. Padang: BPS Sumbar. <https://sumbar.bps.go.id>.
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang. (2015). *Perkembangan organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925-2010*. Padang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fikri, I., & Colombijn, F. (2021). Is green Islam going to support environmentalism in Indonesia? *Anthropology Today*, 37(2), 1518. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12642>.
- Firdaus, K., Ras Bumi, H., Elhusein, S. K., Dahlan, D., Lahmi, A., & Asmaret, D. (2024). Muhammadiyah Minangkabau: Gerakan ulama cum pedagang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 4497-4510. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13623>.
- Firdaus, K., Ras Bumi, H., Elhusein, S. K., Dahlan, D., Lahmi, A., & Asmaret, D. (2024). Muhammadiyah Minangkabau: Gerakan ulama cum pedagang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 4497-4510. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13623>.
- Gade, A. M. (2012). Tradition and sentiment in Indonesian environmental Islam. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 16(3), 263-285. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603005>.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Hakim, L. (2025). The dimensions of leadership in strengthening and institutionalizing religious moderation in Muhammadiyah. *Legality: Jurnal Hukum*.
- Hanifuddin, I. (2016). Muhammadiyah dan adat tanah ulayat Minangkabau. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 1220. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.293>.
- LAZISMU. (2023). *Laporan Tahunan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah 2023*. Jakarta: LAZISMU. <https://www.lazismu.org>.
- McAdam, D. (1982). *Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970*. University of Chicago Press.

- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241. <https://doi.org/10.1086/226464>.
- Muhammadiyah Disaster Management Center Sumatera Barat. (2024). Website resmi MDMC PWM Sumatera Barat.
- Muslim, M. (2021). Haji Abdul Karim Amrullah dan sejarah Muhammadiyah di Maninjau Sumatera Barat. *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 6(1), 1-22. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jms/article/view/12652>.
- Nashir, H. (2015). *Islam Berkemajuan: Risalah Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). (2024). *Data Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. (2024). *Laporan Tahunan Muhammadiyah Sumatera Barat 2024*. Padang: PWM Sumbar.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691186832>.
- Rambe, A., Nurhakim, M., & Amien, S. (2024). Reformasi pendidikan Muhammadiyah: Pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan era digital. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(2), 806-812. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i2.2024.806-812>.
- Rasyid, A. (2019). Sejarah perkembangan organisasi Muhammadiyah di Minangkabau. Padang: LP2M IAIN Bukittinggi.
- Rido, M. R., Nurdin, M., & A. Rachim, H. (2025). Relasi sosial kepemimpinan tradisional Minangkabau dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas ilegal di Nagari Ranah Batahan. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1), 49-64. <https://doi.org/10.25077/jsa.11.1.49-64.2025>.
- Ridwan, R., & Mahmuddin. (2025). Kontribusi sosiologi dakwah dalam menghadapi generasi milenial. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 177-191. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/123>.
- Rohman, F. A., & Mulyati. (2019). Rintisan awal pendidikan Muhammadiyah di Sumatra Barat tahun 1925-1939. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5(1), 45-55. <https://doi.org/10.21009/jpsb.051.04>.
- Setiawati, I., Abdul Hakim, S., Sari, Z., & Fajri, M. D. (2025). Relevansi dan respons pendidikan Muhammadiyah terhadap tantangan era disrupsi digital: Sebuah kajian sistematis. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.52593/pdg.06.2.03>.
- Siswayanti, N. (2016). Haji Abdul Karim Amrullah: Ulama pembaharu Islam di Minangkabau. *Jurnal Dialog*, 39(1). <https://doi.org/10.47655/dialog.v39i1.12>.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26(1), 611-639. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>.
- Suryana, A. (2020). *Islamic Activism and Local Politics in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-7288-3>.
- Syaputra, F. A., & Afrizal, A. (2025). Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer: Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai

- Kamuyang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 11(1), 65–78.
<https://doi.org/10.25077/jsa.11.1.65-78.2025>.
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (3rd ed.)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529>.
- Wijsen, F., & Anshori, M. (2023). Eco-theology in Indonesian Islam: Ideas on stewardship among Muhammadiyah members. *Journal of Government and Civil Society*, 7(1). <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i1.7303>.